

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala dengan limpahan rahmat serta hidayah-Nya Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan implementasi dari pelaksanaan Inpres Nomor 07 tahun 1999 dan juga sebagai bahan pendukung utama dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Walikota. Laporan ini berisikan mengenai hasil-hasil capaian (kinerja) selama satu tahun anggaran dengan titik berat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta penetapan langkah-langkah strategis Kecamatan Kedungkandang Kota Malang di masa yang akan datang.

Malang, 15 Pebruari 2023

CAMAT KEDUNGKANDANG



SAPTO WIBOWO, SH, M. Hum

Pembina

NIP. 19690521 199303 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Siak Kecil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota Malang untuk menangani urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah lainnya. Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang juga menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
- e. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah Kota Malang
- f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditanda tangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022 hasil reuiu, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 Kecamatan Kedungkandang Kota Malang telah tercapai, yaitu seluruhnya dari 3 (tiga) indikator kinerja tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja ini merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Kecamatan serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas PD dan masyarakat. Untuk tahun 2022, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, laporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Kecamatan Kedungkandang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis kewilayahan pada Pemerintah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Malang No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Sebagai unsur pelaksana teknis kewilayahan, wilayah kerja Kantor Kecamatan Kedungkandang meliputi seluruh wilayah Kecamatan Kedungkandang, terdiri dari 12 Kelurahan yaitu, Kelurahan Arjowinangun, Kelurahan Bumiayu, Kelurahan Buring, Kelurahan Cemorokandang, Kelurahan Kedungkandang, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Lesanpuro, Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Mergosono, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Tlogowaru, Kelurahan Wonokoyo.

Berikut isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, partisipasi masyarakat serta pelayanan di Kecamatan Kedungkandang secara singkat:

1. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kedungkandang

a. Struktur Organisasi dan tata kerja di Kecamatan Kedungkandang

Kecamatan berdasar pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, kelembagaan non pemerintah, wilayah, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota Malang.

b. Dibutuhkan mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

2. Berdasarkan partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
 - a. Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam pembangunan Pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah harus didorong sehingga menumbuhkan ekonomi masyarakat. Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Meningkatkan partisipasi pemuda, dan kalangan usia produktif Pemuda, kalangan usia produktif didorong dalam usaha mandiri untuk meningkatkan produktifitas hasil kerajinan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan usaha.

3. Berdasarkan prosedur operasional pelayanan PATEN

Pelayanan PATEN yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai slogan pelayanan publik di Kecamatan Kedungkandang. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Diperlukan Standar pelayanan yang secara normatif dan dikomunikasikan kepada masyarakat. PATEN diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Walikota yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 2 ayat (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa, dan pasal 4 ayat (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam merealisasikan program kebijakan pemerintah, Kecamatan Kedungkandang mempunyai 1 orang Camat, 1 orang Sekretaris Camat, 2 orang Kasubbag, 3 orang Kepala Seksi, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41).

KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, berkedudukan di bawah Walikota.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, dan berkedudukan di bawah Camat.
- (3) Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan berkedudukan di bawah Camat.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang berkedudukan dibawah Camat.
- (6) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan, dan berkedudukan di bawah Lurah.
- (7) Seksi pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi, dan berkedudukan di bawah Lurah.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Prasarana dan Sarana;
- f. Kelurahan, terdiri dari:
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretariat Kelurahan;
 - 3. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;
 - 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

TUGAS DAN FUNGSI

CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
 - c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - i. penyelenggaraan layanan umum di tingkat Kecamatan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kerjanya;
 - k. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - l. pelaksanaan administrasi Kecamatan;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kecamatan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. pelaksanaan program Sekretaris;
 - f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - g. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan keuangan Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
 - d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - g. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
 - i. penyiapan bahan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - j. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - k. pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kecamatan;

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- f. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
- g. penyiapan bahan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- h. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
 - c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat;
 - g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PRASARANA DAN SARANA

- (1) Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan prasarana dan sarana di tingkat Kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kecamatan;
 - c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 - g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana layanan umum tingkat Kecamatan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

KELURAHAN

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Kelurahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Kelurahan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Kelurahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIAT KELURAHAN

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Kelurahan berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kelurahan;
 - g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi Kelurahan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan;
 - g. penyiapan bahan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
 - h. penyiapan bahan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
 - c. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan;
 - e. penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan penanganan masalah kemiskinan dan kesejahteraan rakyat;
 - g. penyiapan bahan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PRASARANA DAN SARANA

- (1) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan prasarana dan sarana di tingkat Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana dan Sarana;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan prasarana dan sarana di tingkat Kelurahan;
 - c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis dan administratif pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. pengumpulan, pengolahan, penyajian data prasarana dan sarana pelayanan umum tingkat Kelurahan;

- h. penyiapan bahan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pelaksana swakelola pekerjaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana dan Sarana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidang tugasnya

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Di lingkungan Kecamatan dapat di bentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

- (1). Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2). Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3). Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

TATA KERJA

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Camat, Sekretaris camat, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi pada Kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasibaik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal Kementrian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Camat, Sekretaris camat, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, serta Kepala Seksi pada Kelurahan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan. Setiap unsr pimpinan pada Kecamatan wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing pimpinan secara berjenjang.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Kepala Subbagian pada Kecamatan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (7) Lurah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Camat.
- (8) Sekretaris Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah.
- (9) Kepala Seksi pada Kelurahan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Lurah

SUSUNAN ORGANISASI

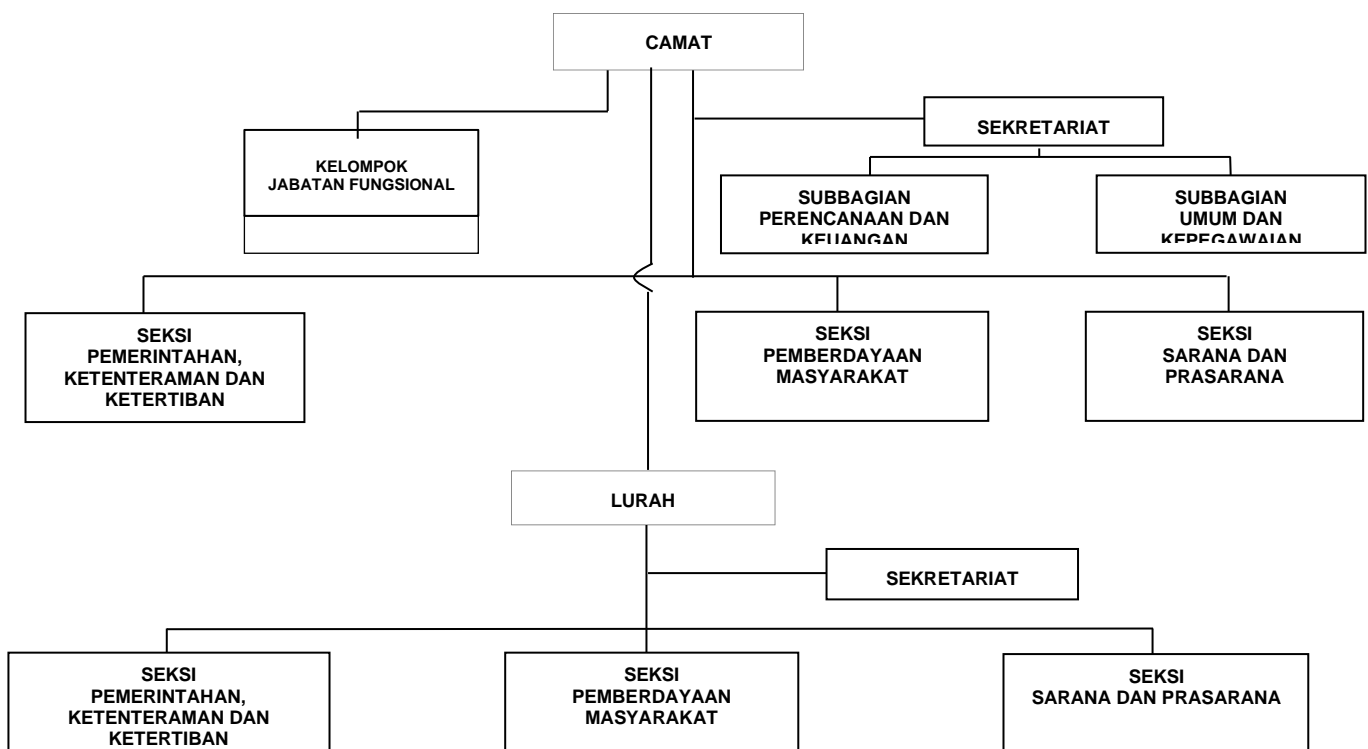
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Prasarana dan Sarana Umum;

Kelurahan, terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. Seksi Prasarana dan Sarana Umum; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGKANDANG TAHUN 2020



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Penyusunan Perencanaan kinerja Kecamatan Kedungkandang tahun 2022 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2022, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2022 untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Sasaran Kecamatan Kedungkandang:

1. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Indikator : Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan

2. Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu

Indikator : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)

3. Sasaran : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Kecamatan Kedungkandang Tahun Anggaran 2022 seperti tercantum pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	70.00	72.50	75.5	77.5	80.00
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	60	3.25	67.00	3.50	3.65
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00	80.01	80.02	80.1	85.2

Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	78,35	80.3	80.4
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan			100%	94%	94%
			Rasio Linmas per RT	0,5	0,65	0.75	1	1
			Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam			40%	96%	100%

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	Meningkatnya kapasitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir			30%	38%	43%
		Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	4,1	4,18	83%	90%	96%
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	-	-	40%	30%	34%

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merelisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:

1. Mensinergikan program pelayanan dengan OPD yang menjadi tanggung jawab Kecamatan dan Kelurahan;
2. Keselarasan data kependudukan;
3. Keselarasan data penerima bantuan pemerintah;
4. Menyelaraskan Road Map Kota Malang sebagai Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif dengan program di Kecamatan Kedungkandang;
5. Meningkatkan peran serta lembaga sosial dan komunitas;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah;
7. Mensinergikan program pembangunan infrastruktur OPD dengan program di Kecamatan dan Kelurahan;

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengusulan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. Adapun arah kebijakan Kecamatan Kedungkandang adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi antar instansi, baik instansi vertical maupun horizontal terkait sarana dan prasarana di Kecamatan Kedungkandang;
 2. Penerapan sistem manajemen pelayanan yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, nyaman, aman, jelas serta terjaga profesionalisme petugas pelayanan;
 3. Menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas;
 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta mensinergikan basis data kependudukan;
 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk mengoptimalkan layanan dasar kesehatan dan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 6. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang membidangi Ekonomi kreatif;
 7. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bidang ekonomi kreatif, lingkungan, kemasyarakatan, dan keagamaan;
 8. Mengintegrasikan basis data UMKM antara OPD yang membidangi dengan Kecamatan Kedungkandang;
 9. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan serta melakukan pendampingan sehingga terwujud pembinaan yang berkelanjutan.
 10. Meningkatkan peran serta lembaga sosial masyarakat;
 11. Meningkatkan peran serta Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 12. Meningkatkan peran serta RT dan Linmas;
 13. Meningkatkan indeks rasa aman, gotong royong dan toleransi;
 14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
 15. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan;
 16. Menciptakan stabilitas keamanan wilayah Kecamatan Kedungkandang.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam SK Nomor: Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Kecamatan Kedungkandang Sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Tujuan/Sasaran Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%	100%	78.35	80.3	80.4
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	70.00	72.50	75.5	77.5	80.00
2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (IKLI)	60	3.25	67.00	3.50	3.65
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00	80.01	80.02	80.1	85.2

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran stategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.440.467.669
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.552.729.866
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.000.000
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	77,5		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif	Rasio Linmas per RT	1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.048.320.000
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	19.801.262.655
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,50		5.638.633.810
Meningkatnya kapasitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	38%		
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	30%		

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.996.327.352
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	5.807.878.436
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	8.100.000
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	72,5		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Rasio Linmas per RT	0.75	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.046.065.000
Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	4.26	Program Pemberdayaan Masyarakat	18.014.613.185
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	65,00		6.832.661.810
Meningkatnya kapasitas penentuan prioritas dalam penanganan masalah di wilayah	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	0.15		
Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	40%		

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai / Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai / Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai / Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban pelaporan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2018-2019 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan Kecamatan Kedungkandang.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan tingkat Kelurahan
2. Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat, serta sarana dan prasarana publik.
3. Meningkatnya pelaporan kinerja dan keuangan yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	77.5	83.93	108.30%	Realisasi nilai IPMas adalah hasil survei pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Bappeda
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.50	4.28	122.29%	Realisasi nilai IKLI adalah hasil survei pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Bappeda
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	85.1	106.36%	Realisasi nilai SAKIP adalah hasil Penilaian pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Inspektorat di tahun 2022
Rata-Rata Capaian				112.32%	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 112.32%** pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,23% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar sebesar 109.09%, kenaikan kinerja di karenakan telah berakhirnya penanganan pandemi COVID-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	93.33%	83,12	83,12	83.93		124.44%	114,65%	99.29%	108.30%	
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	100.00%	76,69	76,69	4.28		133.33%	117,98%	120%	122.29%	
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97.69%	75,72	77,95	85.1		130.25%	94,64%	97.41%	106.36%	
JUMLAH							129.34%	109.09%	105.57%	112.32%	

Pengukuran kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- 1 Sasaran strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas
Indikator kinerja : Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) (Mengalami Kenaikan 9,01%).
- 2 Sasaran strategis : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu
Indikator kinerja : Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik (Mengalami Kenaikan 2.29%)
- 3 Sasaran strategis : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah
Indikator kinerja : Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Mengalami kenaikan 8.95%)

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3.
Realisasi Kinerja Yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Rensta

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2022	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	77.5	93.33%	83,12	83,12	83.93	
2	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.50	100.00%	76,69	76,69	4.28	
3	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	97.69%	75,72	77,95	85.1	

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4.
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2022	2022	2022
1	2	2	4	5	6
		NIHIL			

Dikarenakan Kecamatan tidak melaksanakan urusan wajib layanan dasar, sehingga tidak ada indikator SPM.

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama Tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang telah di perjanjikan adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

Indikator sasaran ini Tahun 2022 mencapai 108.30% Mengalami Kenaikan 9,01% dari target kinerja. Penyebab Permasalahan tahun sebelumnya yaitu belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah mulai diatasi dengan melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis outcome serta meningkatkan kompetensi aparatur. Sementara, penancangan kelurahan siaga yang ditopang oleh LINMAS yang terus digalakkan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dari sisi sosial.

Indikator: Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan terealisasi 83.93 dari target 77.5 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

- 2) Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu.

Pada tahun 2022, indikator sasaran ini telah tercapai sebesar 122.29% mengalami kenaikan sebesar 2.29%. Faktor pendukung keberhasilan adalah adanya alokasi anggaran khusus untuk program peningkatan sarana prasarana kelurahan melalui usulan masyarakat maupun Pokok Pikiran dari DPRD sehingga sarana prasarana di wilayah banyak yang diakomodir.

Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik terealisasi sebesar 4,28 dari target 3.50 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

- 3) Sasaran strategis: Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah capaian indikator 110,53%, mengalami kenaikan sebesar 8,95% melebihi dari yang diperjanjikan. Beberapa terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan nilai SAKIP telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Misalnya, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, Kecamatan Kedungkandang menerapkan penilaian kinerja untuk setiap unit kerja setiap bulan melalui Aplikasi Ekinerja. Penilaian ini dipergunakan untuk melakukan evaluasi berkala sehingga memungkinkan untuk menyusun strategi pencapaian sasaran dan menemukan solusi atas permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada.

Indikator: Nilai SAKIP perangkat daerah telah terealisasi 85,1 dari target sebesar 80.01 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 112,32%, maka realisasi anggaran sebesar 95.96% menunjukkan penggunaan dana masih belum efektif dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Rasio efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Ratio efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	77.5	83.93	108.30%	18.014.613.185	17.642.860.856	97.94%	90,43%
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.50	4.28	122.29%	6.832.661.810	6.737.583.481	98.61%	80.64%
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,01	85.1	106.36%	25.812.305.788	24.132.775.344	93.49%	87.90%

Catatan: > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- 1) Indikator Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan capaian kinerja 108.30% dan capaian anggaran 97.94%, menunjukkan ada ratio efisiensi anggaran 90.43%;
- 2) Indikator Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik dengan capaian kinerja 122.29% dan capaian anggaran 98.61%, menunjukkan bahwa ratio efisiensi anggaran 80.64%;
- 3) Indikator Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 106.36% dan capaian anggaran 93.49%, menunjukkan bahwa ratio efisiensi anggaran 87.90%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.7
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capain (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	77.5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	94%	100%	106.38%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
				Rasio Linmas per RT	1	0,71	71%	Memaksimalkan jumlah Linmas yang ada di setiap kelurahan
			Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	90%	86%	95.55%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
				Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	38%	51.11%	170.37%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3.50	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	30%	66.89%	222.97%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80.3	98.35	122,48%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80.3	98.35	122.48%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%	96%	100%	Melakukan evaluasi Agar kinerja tetap meningkat

Tabel 3.8
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	122,48 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan internal	80,3		95,35		118,74%	
	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100,00 %		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		80%		100,00%	
	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00 %		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		100%		100,00%	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	9	dokumen	9	dokumen	100,00%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT, dan Renatra	9	dokumen	9	dokumen	100,00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	0	dokumen	0	dokumen	0,00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	3	dokumen	3	dokumen	100,00%	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	16	dokumen	16	dokumen	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	147	pegawai	147	pegawai	100,00%	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	50	orang	50	orang	100,00%	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12	bulan	12	bulan	100,00%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/enerangan bangunan kantor	8	jenis	8	jenis	100,00%	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	50	jenis	50	jenis	100,00%	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan	2	kegiatan	2	kegiatan	100,00%	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	5	jenis	5	jenis	100,00%	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2	jenis	2	jenis	100,00%	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman	1500	kotak	1500	kotak	100,00%	
				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5	kali	5	kali	100,00%	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	12	bulan	12	bulan	100,00%	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	7	jenis	7	jenis	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatanpenyediaan jasapenunjang urusanpemerintahan Daerah	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	650	surat	650	surat	100,00%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan belanja telepon, air dan listrik	12	bulan	12	bulan	100,00%	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	8	jenis	8	jenis	100,00%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas ruangan yang dibersihkan	3400	M2	3400	M2	100,00%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulanterpeliharanya barangmilik daerah	12	bulan	12	bulan	100,00%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM dan Pelumas yang disediakan selama 1 tahun	3500	liter	3500	liter	100,00%	
				jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan di proses perizinannya	6	unit	6	unit	100,00%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	1	gedung	1	gedung	100,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM PelayananPerangkat Daerah	122,48 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM PelayananPerangkat Daerah	80,3		98,35		122,48%	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	90%		90%		100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kotalama	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	28	kewenangan	28	kewenangan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah tersedianyadokumenpenyenggaraanurusan pemerintahandi Kecamatan	27	dokumen	25	dokumen	92,31%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah dokumen monografi Kecamatan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kecamatan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen updating sistem informasi pembangunan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kotalma	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah dokumen monografi kelurahan	0	dokumen	0	dokumen	0,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	0	dokumen	0	dokumen	0,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah dokumen monografi kelurahan	2	dokumen	2	dokumen	100,00%	
				jumlah dokumen profil Kelurahan	1	dokumen	1	dokumen	100,00%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	222,97 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan		30%	66,89%		222,97%	
	Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana Di Wilayah Yang Diakomodir	170,37 %		Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir		38%	51,11%		170,37%	
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	95,55%		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		90%	86%		95,55%	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	11	kegiatan	11	kegiatan	100,00%	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungkandang	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotalama	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mergosono	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bumiayu	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonokoyo	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Buring	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lesanpuro	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kelurahan Sawojajar	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	15	unsur	10	unsur	66,67%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Madyopuro	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Cemorokandang	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Arjowinangun	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tlogowaru	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10	unsur	10	unsur	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	8	lokasi	8	lokasi	100,00%	
				jumlah sarana dan prasarana yang sudah dipenuhi	4	jenis	4	jenis	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	10	lokasi	10	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	3	lokasi	3	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	10	lokasi	10	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	8	lokasi	8	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	17	lokasi	17	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	20	lokasi	20	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawojajar	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	28	lokasi	28	lokasi	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	26	lokasi	26	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	18	lokasi	18	lokasi	100,00%	
				Jumlah sumur resapan	10	lokasi	10	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	19	lokasi	19	lokasi	100,00%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	18	lokasi	18	lokasi	100,00%	
			Evaluasi Kelurahan	jumlah kegiatan evaluasi kelurahan	2	kegiatan	2	kegiatan	100,00%	
				Jumlah Satgas Banjir	5	orang	5	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	160	orang	160	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	17	orang	17	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	30	orang	30	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	249	orang	249	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	21	orang	21	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	50	orang	50	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	148	orang	148	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	12	orang	12	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	36	orang	36	orang	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	185	orang	185	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	17	orang	17	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	94	orang	94	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	107	orang	107	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	16	orang	16	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	46	orang	46	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	139	orang	139	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	17	orang	17	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	73	orang	73	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	130	orang	130	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	8	kelompok	8	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	25	orang	25	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	45	orang	45	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	186	orang	186	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	52	orang	52	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	63	orang	63	orang	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	140	orang	140	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	40	orang	40	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	50	orang	50	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	109	orang	109	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	1	kelompok	1	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	24	orang	24	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	72	orang	72	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	122	orang	122	orang	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	21	orang	21	orang	100,00%	
				jumlah kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	50	orang	50	orang	100,00%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	106	orang	106	orang	100,00%	
				Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	4	kelompok	4	kelompok	100,00%	
				jumlah modin dan pengurus jenazah	16	orang	16	orang	100,00%	
				jumlah penjaga makam dan tempat ibadah	47	orang	47	orang	100,00%	
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatanlembagakemasyarakatan yangterfasilitasi	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan PKK	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
				jumlah lembaga kemasyarakatan	8	lembaga	8	lembaga	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan di fasilitasi	4	lembaga	4	lembaga	100,00%	
				Jumlah PKK RT/RW yang aktif	59	PKK	59	PKK	100,00%	
				jumlah RT/RW	59	orang	59	orang	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kotalama	Jumlah Kegiatan pelatihan/sosialisasi / pertemuan PKK kelurahan	4	lembaga	4	lembaga	100,00%	
				Jumlah RT-RW terfasilitasi	152	orang	152	orang	100,00%	
				Pemberdayaan Lansia + Perempuan/PUG +Anak dan Disabilitas	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mergosono	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan terfasilitasi	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	9	lembaga	9	lembaga	100,00%	
				Jumlah RT dan RW yang terfasilitasi	83	orang	83	orang	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bumiayu	5 lembaga	12	bulan	12	bulan	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif	8	lembaga	8	lembaga	100,00%	
				Jumlah PKK RT/RW yang aktif	33	PKK	33	PKK	100,00%	
				jumlah RT/RW	34	orang	34	orang	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Buring	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	4	lembaga	4	lembaga	100,00%	
				Jumlah kegiatan PKK	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
				jumlah RT/RW terfasilitasi	67	orang	67	orang	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/pertemuan PKK Kelurahan	8	kegiatan	8	kegiatan	100,00%	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi	10	kegiatan	10	kegiatan	100,00%	
				Jumlah RT/RW terfasilitasi	105	orang	105	orang	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi	4	lembaga	4	lembaga	100,00%	
				Jumlah PKK RT/RW yang aktif	136	PKK	136	PKK	100,00%	
				jumlah RT/RW terfasilitasi	136	RT RW	136	RT RW	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan pelatihan sosialisasi pertemuan PKK Kelurahan	12	kegiatan	12	kegiatan	100,00%	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan terfasilitasi	5	lembaga	5	lembaga	100,00%	
				jumlah RT/RW terfasilitasi	150	orang	150	orang	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW	76	orang	76	orang	100,00%	
				Jumlah Lembaga Anak / KLA	1	lembaga	1	lembaga	100,00%	
				Jumlah Lembaga Disabilitas	1	lembaga	1	lembaga	100,00%	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	1	lembaga	1	lembaga	100,00%	
				Jumlah Lembaga Lansia / Karang Werda	1	lembaga	1	lembaga	100,00%	
				Jumlah Lembaga Perempuan / PUG	1	lembaga	1	lembaga	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Kegiatan Fasilitasi KLA	3	kegiatan	3	kegiatan	100,00%	
				Jumlah Kegiatan Karang Werdha	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
				Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	4	kegiatan	4	kegiatan	100,00%	
				Jumlah Kegiatan Pengarustamaan Gender	3	kegiatan	3	kegiatan	100,00%	
				Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	
				Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	74	OB	74	OB	100,00%	
				Jumlah kegiatan lembaga yang dibina terfasilitasi	8	kegiatan	8	kegiatan	100,00%	
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan lembaga yang dibina terfasilitasi	8	kegiatan	8	kegiatan	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguanKetentraman danKetertiban umumyang dapatdiselesaikan	106,38 %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguanKetentraman danKetertiban umumyang dapatdiselesaikan	94%		100%		106,38%	
	Rasio Linmas per RT	71,00%		Rasio Linmas per RT	1		0,71		71,00%	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayahyang termonitoring (unit RT)	94%		100%		106,38%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah patroli dan monitoring wilayah	36	kali	36	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah Linmas	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	jumlah Linmas yang aktif	62	orang	62	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah Linmas yang aktif	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	36	kali	36	kali	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah Linmas yang aktif	62	orang	62	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah Linmas yang aktif	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	48	kali	48	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah Linmas yang aktif	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah Linmas	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah Linmas	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	48	kali	48	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah Linmas	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	96	kali	96	kali	100,00%	

Program	Indikator Kinerja	Capaian %	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator kegiatan /Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %	Rencana Tindak Lanjut
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah Linmas yang aktif	38	orang	38	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	48	kali	48	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah Linmas yang aktif	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah Linmas yang aktif	54	orang	54	orang	100,00%	
				jumlah patroli dan monitoring wilayah	144	kali	144	kali	100,00%	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100,00 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	96%		96%		100,00%	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	1	kegiatan	1	kegiatan	100,00%	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur wilayah yang mendapatkan pembinaan oleh Forkopimcam (RT, RW, Linmas)	12	kelurahan	12	kegiatan	100,00%	

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas

Indikator 1 : Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan, dengan target 77.5 telah berhasil tercapai sebesar 83.93 atau tercapai 108.30%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator:

- 1) Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, Target 94% terealisasi 100%, dengan capaian kinerja 106.38%
- 2) Rasio Linmas per RT, Target 1 terealisasi 0,71 sehingga tercapai 71%.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator:

- 1) Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Target 90% terealisasi 86%, dengan capaian kinerja 95.55%
- 2) Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir, Target 38% terealisasi 51.11% sehingga tercapai 170.37%.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu.

Indikator 2 : Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik, dengan target 3.50 telah berhasil tercapai sebesar 4.28 atau tercapai 122.29%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat

Indikator: Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, Target 30% terealisasi 66.89%, dengan capaian kinerja 222.97%

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

Indikator 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan target 80.01 telah berhasil tercapai sebesar 85.1 atau tercapai 110.53%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator: IKM Pelayanan Perangkat Daerah, Target 80.3 terealisasi 98.35%, dengan capaian kinerja 122.48%

2. Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: IKM Pelayanan Perangkat Daerah, Target 80.3 terealisasi 98.35%, dengan capaian kinerja 122.48%

3. Program: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator: Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam, Target 96% terealisasi 96%, dengan capaian kinerja 100%

2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

1. Sasaran strategis: Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas.

Indikator sasaran ini Tahun 2022 mencapai 108.30% Mengalami Kenaikan 9,01% dari target kinerja. Penyebab Permasalahan tahun sebelumnya yaitu belum optimalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan telah mulai diatasi dengan melakukan perencanaan kegiatan yang berbasis outcome serta meningkatkan kompetensi aparatur. Sementara, pencanangan kelurahan siaga yang ditopang oleh LINMAS yang terus digalakkan. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberdayaan masyarakat dari sisi sosial.

Indikator: Indeks Pemberdayaan Masyarakat (IPMas) Kecamatan terealisasi 83.93 dari target 77.5 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

2. Sasaran strategis: Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu. Pada tahun 2022, indikator sasaran ini telah tercapai sebesar 122.29% mengalami kenaikan sebesar 2.29%. Faktor pendukung keberhasilan adalah adanya alokasi anggaran khusus untuk program peningkatan sarana prasarana kelurahan melalui usulan masyarakat maupun Pokok

Pikiran dari DPRD sehingga sarana prasarana di wilayah banyak yang diakomodir.

Indikator: Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik terealisasi sebesar 4,28 dari target 3.50 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

3. Sasaran strategis: Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah capaian indikator 110,53%, mengalami kenaikan sebesar 8,95% melebihi dari yang diperjanjikan. Beberapa terobosan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan meningkatkan nilai SAKIP telah dilaksanakan pada Tahun 2021. Misalnya, dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan aparatur, Kecamatan Kedungkandang menerapkan penilaian kinerja untuk setiap unit kerja setiap bulan melalui Aplikasi Ekinerja. Penilaian ini dipergunakan untuk melakukan evaluasi berkala sehingga memungkinkan untuk menyusun strategi pencapaian sasaran dan menemukan solusi atas permasalahan dan hambatan-hambatan yang ada.

Indikator: Nilai SAKIP perangkat daerah telah terealisasi 85,1 dari target sebesar 80.01 dengan kategori SANGAT BERHASIL.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 85.99% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 52.343.495.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.008.706.534. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.9
Realisasi Anggaran KECAMATAN KEDUNGKANDANG Tahun 2022

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	KECAMATAN		52.705.645.783	50.255.526.022	95,35%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kepuasan internal	19.996.327.352	18.853.443.229	94,28%
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			
		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	26.781.800	21.523.060	80,36%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja/RKT, dan Renatra	2.210.000	350.000	15,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1.831.800	663.060	36,20%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	1.710.000	510.000	29,82%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	21.030.000	20.000.000	95,10%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	18.606.607.080	17.554.209.980	94,34%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	18.603.343.680	17.552.556.880	94,35%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	3.263.400	1.653.100	50,66%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	57.000.000	56.500.000	99,12%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	57.000.000	56.500.000	99,12%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	381.480.550	350.109.243	91,78%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/enerangan bangunan kantor	8.733.200	8.694.075	99,55%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	49.230.300	48.571.968	98,66%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan	27.579.450	5.907.500	21,42%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan	14.596.600	9.200.400	63,03%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.986.000	99,72%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah makanan dan minuman	276.341.000	272.749.300	98,70%
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	211.301.200	208.148.900	98,51%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	211.301.200	208.148.900	98,51%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	360.019.862	320.274.224	88,96%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	16.900.000	10.454.275	61,86%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan belanja telepon, air dan listrik	64.004.640	49.511.920	77,36%

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	22.750.000	15.623.450	68,67%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas ruangan yang dibersihkan	256.365.222	244.684.579	95,44%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulanterpeliharanya barangmilik daerah	353.136.860	342.677.822	97,04%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM dan Pelumas yang disediakan selama 1 tahun	46.231.000	40.443.822	87,48%
		jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan di proses perizinannya			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	306.905.860	302.234.000	98,48%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM PelayananPerangkat Daerah	5.807.878.436	5.242.152.615	90,26%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase penyelesaian layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	5.588.168.158	5.078.782.365	90,88%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	122.800.921	118.080.921	96,16%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	393.227.500	372.680.088	94,77%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Kotalama	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	473.532.915	367.829.858	77,68%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	401.624.400	374.650.475	93,28%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	482.567.400	446.620.780	92,55%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	439.042.572	402.295.875	91,63%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	406.603.700	343.573.709	84,50%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	473.870.350	451.052.335	95,18%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	466.666.800	444.610.330	95,27%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	514.318.500	463.085.061	90,04%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	509.503.000	491.032.218	96,37%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	475.941.500	441.328.783	92,73%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah penyelenggaraan layanan berdasarkan pelimpahan kewenangan	428.468.600	361.941.932	84,47%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah tersedianyadokumenpenyelenggaraanurusan pemerintahandi Kecamatan	219.710.278	163.370.250	74,36%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	jumlah dokumen monografi Kecamatan	20.892.000	15.600.000	74,67%
		jumlah dokumen profil Kecamatan			
		jumlah dokumen updating sistem informasi pembangunan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah dokumen monografi kelurahan	7.677.250	2.052.250	26,73%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Kotalma	jumlah dokumen monografi kelurahan	2.500.000	-	0,00%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah dokumen monografi kelurahan	8.850.000	8.310.000	93,90%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah dokumen monografi kelurahan	21.000.000	16.472.000	78,44%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah dokumen monografi kelurahan	2.791.028	450.000	16,12%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah dokumen monografi kelurahan	57.000.000	56.890.000	99,81%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah dokumen monografi kelurahan	-	-	
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah dokumen monografi kelurahan	23.730.000	376.000	1,58%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah dokumen monografi kelurahan	25.000.000	21.740.000	86,96%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah dokumen monografi kelurahan	10.000.000	6.000.000	60,00%
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah dokumen monografi kelurahan	20.270.000	18.435.000	90,95%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah dokumen monografi kelurahan	20.000.000	17.045.000	85,23%
		jumlah dokumen profil Kelurahan			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	24.847.274.995	24.273.381.837	97,69%
		Persentase Usulan Masyarakat Untk Sarana Prasarana di Wilayah Yang Diakomodir			
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lembaga Masyarakat	187.333.500	176.545.900	94,24%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	28.863.400	28.863.400	100,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kedungkandang	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	12.000.000	11.900.000	99,17%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotalama	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10.600.000	9.060.000	85,47%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Mergosono	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	20.000.000	18.650.000	93,25%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Bumiayu	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	14.720.000	11.600.000	78,80%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Wonokoyo	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	16.800.000	16.800.000	100,00%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Buring	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	11.996.500	11.996.500	100,00%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lesanpuro	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10.688.600	8.500.000	79,52%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sawojajar	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10.000.000	9.783.000	97,83%

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Madyopuro	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	14.075.000	13.400.000	95,20%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Cemorokandang	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	15.000.000	15.000.000	100,00%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Arjowinangun	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	12.590.000	11.358.000	90,21%
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Tlogowaru	jumlah unsur kemasyarakatan yang aktif dalam musrenbang	10.000.000	9.635.000	96,35%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungkandang	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	512.308.750	491.660.900	95,97%
		jumlah sarana dan prasarana yang sudah dipenuhi			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kotalama	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	890.805.850	888.145.850	99,70%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mergosono	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	346.490.000	346.460.000	99,99%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bumiayu	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	500.473.900	499.873.900	99,88%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wonokoyo	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	305.800.000	305.664.855	99,96%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buring	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	515.928.800	508.062.800	98,48%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lesanpuro	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	598.186.450	584.330.801	97,68%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sawojajar	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	527.110.600	522.076.000	99,04%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Madyopuro	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	917.883.500	917.883.100	100,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cemorokandang	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	758.300.000	746.080.475	98,39%
		Jumlah sumur resapan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Arjowinangun	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	337.300.000	335.200.000	99,38%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tlogowaru	jumlah sarana dan prasarana yang sudah di bangun	357.440.000	348.412.000	97,47%
	Evaluasi Kelurahan	jumlah kegiatan evaluasi kelurahan	264.633.960	243.732.800	92,10%
		Jumlah Satgas Banjir			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan	21.700.000	14.545.000	67,03%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kedungkandang	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	758.262.500	755.565.500	99,64%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kotalama	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	1.073.308.200	1.063.120.000	99,05%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mergosono	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	667.690.000	666.500.000	99,82%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bumiayu	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	994.212.000	983.870.000	98,96%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wonokoyo	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	558.000.000	557.700.000	99,95%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buring	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	788.500.000	742.800.000	94,20%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	639.653.600	635.025.500	99,28%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	1.002.336.600	987.700.600	98,54%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Madyopuro	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	826.360.000	816.442.000	98,80%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	686.975.000	594.290.550	86,51%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	648.883.500	648.875.000	100,00%
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah kegiatan			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tlogowaru	Jumlah Guru Ngaji dan Sekolah Minggu terfasilitasi	571.200.000	563.933.500	98,73%
		Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya			
		jumlah modin dan pengurus jenazah			
		jumlah penjaga makam dan tempat ibadah			
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	8.590.198.285	8.328.884.806	96,96%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan PKK	219.350.000	212.646.429	96,94%
		jumlah lembaga kemasyarakatan			
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kedungkandang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan di fasilitasi	533.960.000	523.066.000	97,96%
		Jumlah PKK RT/RW yang aktif			
		jumlah RT/RW			

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kotalama	Jumlah Kegiatan pelatihan/ sosialisasi / pertemuan PKK kelurahan Jumlah RT-RW terfasilitasi Pemberdayaan Lansia + Perempuan/PUG +Anak dan Disabilitas	1.018.345.185	1.006.521.574	98,84%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Mergosono	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan PKK Kelurahan terfasilitasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kelurahan yang terfasilitasi Jumlah RT dan RW yang terfasilitasi	641.807.600	633.350.601	98,68%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bumiayu	5 lembaga	595.372.700	585.432.625	98,33%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Wonokoyo	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif Jumlah PKK RT/RW yang aktif jumlah RT/RW	410.763.400	387.037.321	94,22%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Buring	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Jumlah kegiatan PKK jumlah RT/RW terfasilitasi	620.200.000	563.621.500	90,88%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lesanpuro	Jumlah Kegiatan Pelatihan/Sosialisasi/pertemuan PKK Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan yang terfasilitasi Jumlah RT/RW terfasilitasi	810.522.000	777.700.044	95,95%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sawojajar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kelurahan yang terfasilitasi Jumlah PKK RT/RW yang aktif jumlah RT/RW terfasilitasi	987.036.000	977.342.800	99,02%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Madyopuro	Jumlah kegiatan pelatihan sosialisasi pertemuan PKK Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan terfasilitasi jumlah RT/RW terfasilitasi	1.006.150.000	1.002.250.000	99,61%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Cemorokandang	Jumlah Ketua RT dan Ketua RW Jumlah Lembaga Anak / KLA Jumlah Lembaga Disabilitas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Lansia / Karang Werda Jumlah Lembaga Perempuan / PUG	658.260.000	622.662.870	94,59%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Arjowinangun	Jumlah Kegiatan Fasilitasi KLA Jumlah Kegiatan Karang Werda Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gender Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	668.730.000	653.466.300	97,72%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tlogowaru	Jumlah kegiatan lembaga yang dibina terfasilitasi	419.701.400	383.786.742	91,44%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dapat diselesaikan Rasio Linmas per RT	2.046.065.000	1.879.098.341	91,84%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan wilayah yang termonitoring (unit RT)	2.046.065.000	1.879.098.341	91,84%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah patroli dan monitoring wilayah	41.250.000	41.000.000	99,39%

No	Uraian	Indikator Kinerja	Jumlah (Rp)		%
			Anggaran	Realisasi	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kedungkandang	jumlah Linmas	151.700.000	150.499.676	99,21%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Kotalama	jumlah Linmas yang aktif	228.940.000	188.896.400	82,51%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Mergosono	jumlah Linmas yang aktif	161.820.000	139.710.000	86,34%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bumiayu	jumlah Linmas yang aktif	170.400.000	170.329.320	99,96%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Wonokoyo	jumlah Linmas yang aktif	169.600.000	163.864.535	96,62%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan Kelurahan Buring	jumlah Linmas yang aktif	200.810.000	183.168.500	91,21%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Lesanpuro	jumlah Linmas	147.065.000	141.600.000	96,28%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sawojajar	jumlah Linmas	164.200.000	155.247.810	94,55%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Madyopuro	jumlah Linmas	183.730.000	162.030.000	88,19%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Cemorokandang	jumlah Linmas yang aktif	113.800.000	113.800.000	100,00%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Arjowinangun	jumlah Linmas yang aktif	157.750.000	156.247.100	99,05%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kelurahan Tlogowaru	jumlah Linmas yang aktif	155.000.000	112.705.000	72,71%
		jumlah patroli dan monitoring wilayah			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	8.100.000	7.450.000	91,98%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	8.100.000	7.450.000	91,98%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur wilayah yang mendapatkan pembinaan oleh Forkopimcam (RT, RW, Linmas)	8.100.000	7.450.000	91,98%

BAB IV

P E N U T U P

Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang merupakan pertanggungjawaban dari kinerja Camat yang telah dicapai tahun 2022 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Camat terhadap penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan selama kurun waktu satu tahun baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kedungkandang Anggaran 2022 ini dapat dikatakan **BERHASIL**, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel di atas. Adapun dampak dan manfaat dari pelaksanaan dan kegiatan dimaksud masih berupa data kualitatif dan belum menunjukkan secara kuantitatif, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal organisasi.

Secara khusus pembiayaan anggaran operasional yang diperlukan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja kebijakan teknis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kecamatan Kedungkandang pada Tahun Anggaran 2022, masih ada sebagian yang belum terselesaikan. Hal tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dalam segi teknis maupun non teknis operasional. Kedepan diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan juga harus disertai dengan dukungan dana dari Pemerintah Kota Malang sehingga sasaran sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Malang dapat tercapai.

Malang, 15 Pebruari 2023

CAMAT KEDUNGKANDANG,



SAPTO WIBOWO, SH, M. Hum

Pembina

NIP. 19690521 199303 1 005

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Capaian kinerja sasaran
- 3). Nilai SAKIP 2022
- 4). IPMas
- 5). IKLI